



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Direktorat Perbenihan

TRIWULAN I

2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
DIREKTORAT PERBENIHAN

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perbenihan triwulan I Tahun 2024 ini, yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Perbenihan selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Perbenihan tahun 2024.

LKj Direktorat Perbenihan triwulan I Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan, sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi serta dapat memberikan umpan balik untuk pencapaian kinerja triwulan berikutnya pada tahun 2024 atau dapat dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja organisasi serta bahan evaluasi melalui langkah-langkah perbaikan pelayanan yang lebih profesional dan transparan bagi masyarakat.

Demikian laporan ini disajikan semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang.

Jakarta, April 2024
Direktur Perbenihan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Nono Hartanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Tugas dan Fungsi.....	3
1.4. Permasalahan Utama.....	5
1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj).....	5
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020-2024.....	7
2.2. Sasaran Strategis.....	8
2.3. Penetapan Kinerja.....	9
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Perbenihan TW I Tahun 2024.....	12
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
3.2. Analisis Kinerja.....	16
3.2.1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan Bidang Perbenihan.....	16
3.2.1.1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perbenihan.....	16
3.2.2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan.....	17
3.2.2.1. Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat.....	17
3.2.2.2. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat.....	19
3.2.2.3. Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat.....	20
3.2.2.4. Calon Induk Unggul yang Diproduksi.....	22

3.2.2.5. Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat.....	24
3.2.2.6. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat.....	25
3.2.2.7. Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun.....	27
3.2.2.8. Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi.....	29
3.2.3. Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha.....	32
3.2.3.1. Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun.....	32
3.2.4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan.....	34
3.2.4.1. Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB...	34
3.2.5. Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan..	35
3.2.5.1. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan	35
3.2.5.2. Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan.....	36
3.2.5.3. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perbenihan.....	36
3.2.5.4. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Perbenihan.....	37
3.2.5.5. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Perbenihan.....	38
3.2.5.6. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA.....	39
3.2.5.7. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan.....	40
3.2.5.8. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan	41
3.2.5.9. IKSK.04.9 Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan.....	42
BAB 4. PENUTUP.....	43
4.1. KESIMPULAN.....	43
4.2. REKOMENDASI.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel A.Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Perbenihan Tahun 2024.....vii	
Tabel 1.1.Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Perbenihan Tahun 2024.....	2
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2023 Direktorat Perbenihan	15
Tabel 3.2. Capaian Tenaga kerja yang terlibat di bidang perbenihan triwulan 1 2024.....	16
Tabel 3.3.Capaian bantuan sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke masyarakat	18
Tabel.3.4. Unit Pelaksana Teknis DJPB yang melaksanakan bantuan calon induk.....	19
Tabel 3.5.Capaian Calon induk yang didistribusikan berdasarkan usulan masyarakat.	20
Tabel 3.6.Capaian bantuan benih ikan yang disalurkan ke Masyarakat.....	21
Tabel 3.6.Realisasi Bantuan Benih dan Restocking Triwulan I Tahun 2024	21
Tabel 3.7.Realisasi Bantuan Benih dan Restocking Triwulan I Tahun 2024	23
Tabel 3.8. Capaian IKU Produksi calon induk di UPT.....	24
Tabel 3.9.Capaian Bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat tahun 2024	25
Tabel. 3.10.Capaian Bantuan Kebun Bibit Rumput Luaut Triwulan 1 tahun 2024	26
Tabel 3.11.Capaian Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun	28
Tabel 3.12.Capaian Progres operasional pusat produksi benih dan induk pada 3 lokasi	30
Tabel 3.13.Capaian NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun.....	33
Tabel 3.14.Capaian Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan CPIB Dibandingkan dengan yang Mendapatkan Sertifikat CPIB.....	34
Tabel 3.15.Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan TW 1 tahun 2024	35

Tabel 3.16.Capaian Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan TW 1 Tahun 2024	36
Tabel 3.17.Capaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan TW 1 Tahun 2024	37
Tabel 3.18.Capaian Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan.....	38
Tabel 3.19.Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan.....	39
Tabel 3.20.Capaian Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA	40
Tabel 3.21.Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan	41
Tabel 3.22.Capaian Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan.....	41
Tabel 3.23.Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.....	5
Gambar 2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024.....	7
Gambar 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024.....	8
Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2024.....	12
Gambar 2.4. Nilai Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024.....	14
Gambar 3.1. Target Produksi Calon Induk.....	23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Perbenihan triwulan 1 Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi Kinerjaku pada triwulan 1 Direktorat Perbenihan mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,99 % dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 20 indikator kinerja dengan rincian seperti terlihat dalam Tabel A.

Tabel A. Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Perbenihan Tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Capaian
			Thn 2024	TW1	TW 1
SK.01	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan Bidang Perbenihan				0
IKSK.01.1	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan (orang)	orang	11.504	0	0
SK.02	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan				0
IKSK.02.1	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	0	0
IKSK.02.2	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	0	0
IKSK.02.3	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	15	24,80
IKSK.02.4	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (ekor)	ekor	1.000.000	0	0
IKSK.02.5	Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	0	0
IKSK.02.6	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	0	0
IKSK.02.7	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun (lokasi)	lokasi	2	0	0
IKSK.02.9	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi (persen)	persen	60	0	0
SK.03	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha				0
IKSK.03.1	Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun (persen)	persen	70	0	0
SK.04	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan				0
IKSK.04.1	Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB (persen)	persen	50	0	0
SK.05	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Perbenihan				51,16
IKSK.05.1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	persen	85	0	0
IKSK.05.2	Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan (nilai)	nilai	82	0	0
IKSK.05.3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	persen	80	80	90

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Capaian
			Thn 2024	TW1	TW 1
IKSK.05.4	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	persen	94	94	133,33
IKSK.05.5	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	persen	80	0	0
IKSK.05.6	Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (persen)	persen	91	10	32,96
IKSK.05.7	Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan (nilai)	nilai	75	0	0
IKSK.05.8	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan (persen)	persen	80	80	100
IKSK.05.9	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan (persen)	persen	90	5	2,37

Capaian indikator pada Triwulan I tahun 2024 seperti terlihat tabel A menunjukkan bahwa kinerja perbenihan sangat baik karena beberapa indikator kinerja utama untuk melebihi dari target 100%, kecuali 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yaitu penyerapan anggaran.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budi daya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budi Daya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budi daya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Terkait dengan kebijakan tersebut Direktorat Perbenihan, berupaya untuk mendukung kebijakan tersebut melalui pemenuhan target dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Perbenihan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan Bidang Perbenihan	1.	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan (orang)	11.504
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2.	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		5.	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (ekor)	1.000.000
		6.	Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		7.	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		8.	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun (lokasi)	2
		9.	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi (persen)	60
		3.	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha	10.
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan	11.	Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB (persen)	50
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Perbenihan	12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	85
		13.	Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan (nilai)	82

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	80
	15. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	94
	16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	80
	17. Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (persen)	91
	18. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan (nilai)	75
	19. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan (persen)	80
	20. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan (persen)	98

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan I tahun 2024 Direktorat Perbenihan ini adalah sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap pencapaian target IKU di triwulan berikutnya agar pencapaian target tahunan dapat terpenuhi secara sempurna.

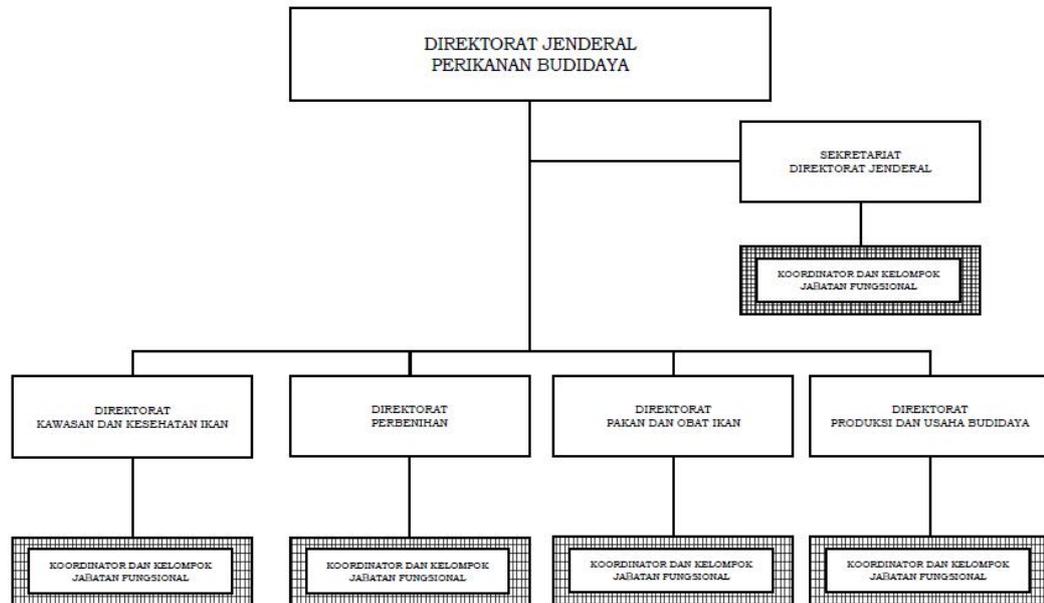
1.3. Tugas dan Fungsi

Direktorat Perbenihan berdasarkan Permen No.48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, perbenihan ikan air payau dan perbenihan ikan laut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktorat Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia, dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul,
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan susunan organisasi Direktorat Perbenihan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

1.4. Permasalahan Utama

Secara umum permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam Kinerja Direktorat Perbenihan terutama dalam upaya peningkatan produksi perikanan budi daya adalah isu jaminan keamanan pangan produk yang menjadi tuntutan, baik pasar luar negeri maupun dalam negeri, sehingga pentingnya jaminan bagi unit pembenihan untuk menghasilkan benih yang sehat dan bermutu melalui sertifikasi CPIB.

1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Laporan Kinerja (LKJ) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Perbenihan pada triwulan I Tahun 2024. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Perbenihan, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) triwulan 1 Tahun 2024 dengan target kinerja pada triwulan tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*), sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

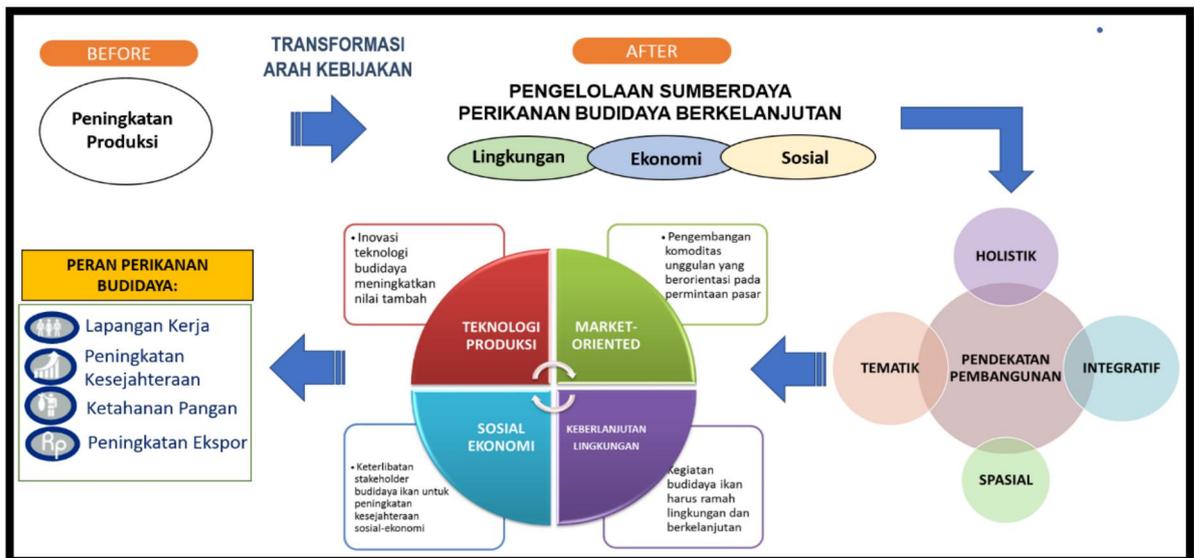
Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Perbenihan pada triwulan I tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Ditjen Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Perbenihan termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Ditjen Perikanan Budi Daya pada tahun 2020 - 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2022 serta penetapan kinerja Direktorat Perbenihan.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Perbenihan serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/ pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab III.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budidaya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budi Daya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budi daya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budi daya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budi daya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan

Produksi Perikanan Budi Daya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Perbenihan sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis Direktorat Perbenihan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kampung Budidaya berbasis kearifan lokal;
- b. Terkelolanya perikanan budi daya berkelanjutan;
- c. Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang perbenihan; dan
- d. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Satker Direktorat Perbenihan.

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Perbenihan telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. Penetapan sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja (IKK) Direktorat Perbenihan Tahun 2024 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Direktorat Perbenihan selama 1 (satu) triwulan, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja;

- b. Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2024; dan
- c. Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi setiap triwulannya.

2.3. Penetapan Kinerja

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja, maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai Perjanjian Kinerja antara Direktorat Perbenihan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2024 seperti terlihat dalam gambar 2.3.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PERBENIHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nono Hartanto**
Jabatan : Direktur Perbenihan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **TB. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

TB. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Perbenihan

Nono Hartanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PERBENIHAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan Bidang Perbenihan	1.	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan (Orang)	11.504
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2.	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		5.	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Ekor)	1.000.000
		6.	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		7.	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		8.	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun (Lokasi)	2
		9.	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi (Persen)	60
		3.	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha	10.
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan	11.	Persentase Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan CPIB Dibandingkan dengan yang Mendapatkan Sertifikat CPIB (Persen)	50
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat	12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan (Persen)	85

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Perbenihan	13. Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan (Nilai)	82
	14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan (Persen)	80
	15. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan (Persen)	94
	16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan (Persen)	80
	17. Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
	18. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan (Nilai)	75
	19. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan (Persen)	80
	20. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan (Persen)	98

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



TB. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Direktur Perbenihan



Nono Hartanto

DATA ANGGARAN :

NO	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pelayanan Publik Kepada Lembaga	800.000.000
2.	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.200.000.000
3.	Bantuan Peralatan / Sarana	33.200.000.000
4.	Bantuan Hewan	4.579.994.000
Total Anggaran Direktorat Perbenihan Tahun 2023		39.779.994.000

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
TB. Haeru RahayuPihak Pertama
Direktur Perbenihan
Nono Hartanto

Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2024

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Perbenihan TW I Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Perbenihan dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Perbenihan dengan data pencapaian kerjanya. Metode pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh Tim Kinerja, sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat yakni dari unit kerja pemilik kegiatan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Perbenihan TW I Tahun 2024, menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/ semesteran/ tahunan);
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;

3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id”;
5. Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).

Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

1. *Maximize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

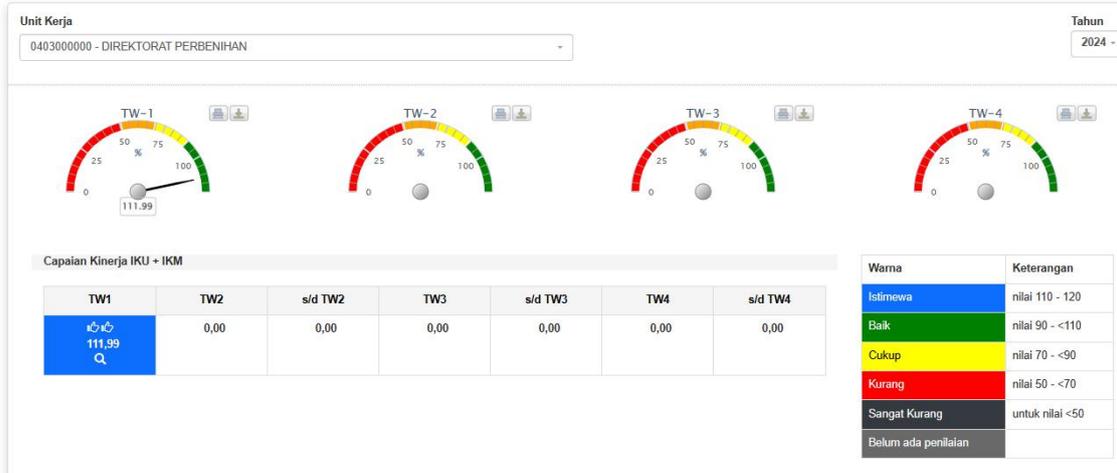
2. *Minimize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. *Stabilize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan penerapan Aplikasi “Kinerjaku”, capaian NKO Direktorat Perbenihan triwulan 1 tahun 2024 sebesar 111,99 seperti terlihat dalam gambar 2.4.



Gambar 2.4. Nilai Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas capaian organisasi Direktorat Perbenihan, yang menjadi indikator utama sebanyak 11 indikator dan 9 indikator kegiatan dengan rincian seperti disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan 1 Tahun 2023 Direktorat Perbenihan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET Tahunan 2024	TW I	
				TARGET	CAPAIAN
1	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan	orang	11.504	0	0
2	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat	persen	75	0	0
3	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	0	0
4	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	15	24,80
5	Calon Induk Unggul yang Diproduksi	ekor	1.000.000	0	0
6	Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	0	0
7	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	0	0
8	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun	lokasi	2	0	0
9	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi	persen	60	0	0
10	Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun	persen	70	0	0
11	Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB	persen	50	0	0
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan	persen	85	0	0
13	Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan	nilai	82	0	0
14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan	persen	80	80	90
15	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan	persen	94	94	133,33
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan	persen	80	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET Tahunan 2024	TW I	
				TARGET	CAPAIAN
17	Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA	persen	91	10	32,96
18	Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan (nilai)	nilai	75	0	0
19	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan	persen	80	80	100
20	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan	peren	90	5	2,37

3.2. Analisis Kinerja

3.2.1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan Bidang Perbenihan

3.2.1.1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perbenihan

Indikator kinerja ini merupakan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pengelolaan Perbenihan Ikan pada Direktorat Perbenihan tahun 2024, baik secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan program prioritas dan bantuan pemerintah.

Tenaga kerja yang terlibat dalam program prioritas terdiri dari kegiatan bantuan benih, bantuan calon induk, bantuan bibit rumput laut, bantuan Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL), bantuan sarana dan prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) / Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT), dan modeling rumput laut berbasis kawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan dan UPT DJPB.

Tabel 3.2. Capaian Tenaga kerja yang terlibat di bidang perbenihan triwulan 1 2024

Sasaran Kegiatan IKU 2023		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
		Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perbenihan						Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		2024		% Capaian		% pertumbuhan thn 2023-2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024		
TW 1	Tahun 2023	Target	Realisasi	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024		Target 2025	% Capaian thd target akhir Renstra	
-	22.720	11.504	0	0	0	0	-	-	

Capaian yang terlibat dalam kegiatan bantuan pemerintah di bidang Perbenihan, capaian tenaga kerja pada triwulan 1 tahun 2024 belum dilakukan perhitungan, namun sebagai bahan untuk rencana kerja pada triwulan berikutnya tenaga kerja yang menjadi potensi perhitungan adalah dari tenaga yang terlibat dalam kegiatan bantuan benih dengan jumlah 1.150 orang, bantuan calon induk

390 Orang, bantuan bibit rumput laut 80 orang, dan bantuan kebun bibit rumput laut sebanyak 20 orang. Untuk kegiatan bantuan sarpras dan modeling rumput laut masih dalam proses kontrak dan persiapan pengadaan, sehingga belum ada realisasi tenaga kerja yang terlibat dalam bantuan tersebut.

3.2.2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan

3.2.2.1. Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat

Kebijakan strategis pembangunan perikanan budi daya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan khususnya untuk peningkatan produksi ikan air tawar, payau, dan laut perlu penyediaan unit pembenihan ikan di daerah pengembangan perikanan budi daya. Pada tahun anggaran 2024, bantuan sarpras UPR dan HSRT yang disalurkan ke masyarakat diberikan di beberapa lokasi Kampung Perikanan Budidaya untuk turut serta dalam mendukung Program Terobosan yang bergerak pada sektor perikanan budi daya.

Tujuan pelaksanaan bantuan adalah untuk meningkatkan produksi benih ikan bermutu di masyarakat karena ketersediaan benih ikan yang dimaksud tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah atau perusahaan skala besar. Oleh karena itu, pemenuhan benih ikan bermutu juga membutuhkan peran serta masyarakat agar ketersediaan benih di berbagai daerah dapat terpenuhi.

Bantuan sarpras UPR/ HSRT TA 2024 dilakukan oleh 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budi Daya (BBPBAT Sukabumi, BPBAT Sungai Gelam Jambi, BPBAT Mandiangin, BPBAT Tatelu, dan BPBAP Takalar) sebanyak 30 paket di 29 Kabupaten/ Kota dengan wilayah lokasi penyaluran yaitu Sukabumi, Bandung, Purwakarta, Tasikmalaya, Temanggung, Wonosobo, Grobogan, Demak, Merangin, Sungai Penuh, Kuantan Singingi, Kota Pariaman, Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Lampung Utara, HS Selatan, HS Tengah, Malinau, Kapuas, Pulang Pisau, Kutai Kertanegara, Sinjai, Gowa, Bulukumba, Minahasa Utara, Pinrang, Enrekang, Maros, dan Soppeng.

Jenis bantuan berupa sarana sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 441 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Unit Pembenihan Rakyat dan Hatchery Tahun Anggaran 2024. Bantuan sarana unit pembenihan yang diberikan dengan menu yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi lapangan atau kebutuhan kelompok penerima bantuan, antara lain: (a) Bentuk Induk dan pakan (induk ikan, pakan induk, pakan benih, dan/ atau larva/ telur); dan (b) Peralatan pendukung (peralatan perikanan, peralatan uji kualitas air, aerasi,

wadah pemeliharaan, instalasi air, peralatan resirkulasi, sarana biosecurity, instalasi penetasan telur, obat ikan dan vitamin, instalasi penetasan telur). Komoditas ikan yang diberikan disesuaikan dengan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya.

Tabel 3.3. Capaian bantuan sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Persentase Bantuan Sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke Masyarakat							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024			
-	100%	75%	-	0	0	0	-	-	-

Pada periode triwulan I, identifikasi dan verifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) telah dilaksanakan di 27 kab/kota (28 kelompok unit pembenihan). Namun, bantuan unit pembenihan belum direalisasikan pada triwulan I karena masih ada 2 (dua) wilayah yang belum dilakukan identifikasi dan verifikasi, yaitu Kab Malinau dan Kab Minahasa Utara, selain itu juga dalam proses pengadaan barang dan jasa pada lokasi yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.

Penetapan SK Penetapan Penerima Bantuan sudah dilakukan pada lokasi-lokasi yang sudah terverifikasi calon penerimanya. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik secara tender, lelang, ataupun pengadaan langsung.

Pagu anggaran kegiatan bantuan sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan realisasi pada periode triwulan I sebesar Rp, 90.450.399,- atau 6,03% dalam rangka identifikasi dan verifikasi bantuan.

Rekomendasi atas rencana aksi atas hasil capaian triwulan 1 tahun 2024, yaitu: (i) Agar pelaksanaan bantuan sesuai dengan pedoman Juknis Bantuan Sarana Unit Pembenihan; (ii) Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi CPCL di Kab Malinau dan Kab Minahasa Utara agar segera dilaksanakan; (iii) SK Penerima Bantuan Sarpras UPR/ HSRT agar segera disusun; (iv) Hasil verifikasi CPCL agar ditindaklanjuti dengan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).

3.2.2.2. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat

Dalam usaha budi daya ikan secara intensif dibutuhkan benih dan induk yang memiliki kualitas baik. Induk yang unggul akan dapat menghasilkan benih ikan yang bermutu pula. Sedangkan dengan melakukan pemeliharaan benih yang bermutu maka proses produksi akan menjadi efektif dan efisien. Program bantuan calon induk merupakan salah satu program prioritas yang ditujukan untuk peremajaan induk-induk yang ada di masyarakat, dimana sasaran bantuan calon induk ini adalah unit-unit pembenihan milik masyarakat maupun balai benih ikan milik pemerintah provinsi atau kabupaten.

Kegiatan bantuan calon induk dilaksanakan oleh 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Direktorat Perbenihan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi memproduksi calon induk ikan air tawar, payau, dan laut. Target bantuan calon induk yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah 60.914 ekor dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Jenis calon induk ikan yang dibantukan antara lain ikan nila, lele, mas, patin, papuyu, nilem, gabus haruan, udang vanname, bandeng, kakap putih, dan bawal bintang. Adapun rincian target pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang mendapatkan penugasan yaitu:

Tabel.3.4. Unit Pelaksana Teknis DJPB yang melaksanakan bantuan calon induk.

No	Unit Pelaksana Teknis	Target (ekor)
1	Direktorat Perbenihan	25.169
2	BBPBAT Sukabumi	7.742
3	BPBAT Sungai Gelam Jambi	6.856
4	BPBAT Mandiangin	6.284
5	BPBAT Tatelu	5.713
6	BPBAP Ujung Batee	805
7	BPBAP Takalar	3.218
8	BPIUUK Karangasem	4.983
9	BBPBL Lampung	32
10	BPBL Ambon	20
11	BPBL Lombok	20
12	BPBL Batam	72
Jumlah Target		60.914

Indikator Kinerja Bantuan Calon Induk ini diukur secara semesteran dengan target 75%, dimana dalam penghitungannya adalah membandingkan antara jumlah calon induk yang direalisasikan dengan hasil verifikasi. Atas kondisi tersebut maka belum dilakukan analisa terhadap capaian IKU Bantuan Calon Induk ini pada triwulan I tahun 2024. Namun, beberapa UPT telah merealisasikannya sebanyak 23.085 ekor atau 37,90% dari target. UPT yang telah merealisasikan bantuan calon

induk diantaranya yaitu BBPBAT Sukabumi sebanyak 9.625 ekor, BPBAT Sungai Gelam 2.060 ekor, BPBAT Mandiangin 3.600 ekor, BPBAT Tatelu 2.800 ekor, dan BPIUUK Karangasem 5.000 ekor. Bantuan calon induk tersebut telah terdistribusi kepada 38 pokdakan yang tersebar di 9 provinsi dan 19 kabupaten/kota

Tabel 3.5. Capaian Calon induk yang didistribusikan berdasarkan usulan masyarakat.

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya perikanan budidaya berkelanjutan							
IKU		Persentase calon induk yang disalurkan ke masyarakat							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024			
6,72%	203,43%	75%	-	0	0	0	-	-	-

Dalam rangka pencapaian target bantuan calon induk pada periode berikut, maka disiapkan rencana aksi untuk mempercepat proses pelaksanaan program bantuan calon induk ke masyarakat, diharapkan setiap UPT lingkup DJPB dapat menindaklanjuti adanya usulan yang telah masuk dan melakukan identifikasi dan verifikasi kepada calon penerima bantuan serta segera mendistribusikannya setelah ada penetapan.

Apabila dibandingkan antara triwulan 1 tahun 2024 dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya terdapat perbedaan pencapaian, kondisi ini dikarenakan pada tahun 2024 triwulan 1 belum dilakukan penghitungan karena tergetnya secara semesteran lain halnya yang tahun 2023 tergetnya secara triwulanan sehingga pada triwulan 1 ada nilai pencapaian. Sedangkan pagu anggaran yang tersedia pada kegiatan bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 233.743.500,- atau 9,35%.

3.2.2.3. Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat

Dalam rangka mendukung kebijakan strategis pembangunan perikanan budi daya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budi daya, perlu dilakukan penyediaan benih ikan, diantaranya melalui program bantuan benih ikan.

Program bantuan benih ikan merupakan salah satu kegiatan prioritas andalan Ditjen Perikanan Budi Daya. Benih ikan merupakan faktor penting dalam kegiatan pembudidayaan ikan, karena pembudidaya ikan kecil masih sangat memerlukan bantuan ikan benih bermutu yang dihasilkan dari induk ikan unggul. Tujuan bantuan benih ikan adalah untuk menstimulus kegiatan budidaya ikan, meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan, dan untuk menambah stok sumber daya ikan pada suatu perairan umum.

Pelaksanaan bantuan benih berpedoman pada Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 381 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2024. Pemberi bantuan benih ikan adalah Direktorat Perbenihan dan Satker UPT lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu BBPBAT Sukabumi, BBPBL Lampung, BPBAT Sungai Gelam Jambi, BPBAT Mandiangin, BPBAT Tatelu, BPBAP Ujung Batee, BPBAP Takalar, BPBL Ambon, BPBL Lombok, BPBL Batam, BPIUUK Karangasem, dan/atau Satker lingkup DJPB yang ditunjuk oleh Dirjen Perikanan Budi Daya.

Tabel 3.6. Capaian bantuan benih ikan yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024			
34,15%	114,06%	75%	-	24,80%	-	-	-	-	-

Bantuan benih bermutu ikan air tawar, payau, dan laut yang didistribusikan ke masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu para pembudidaya skala kecil dan mikro untuk meningkatkan hasil produksi, serta untuk *restocking* ikan lokal di perairan umum dengan tujuan untuk menjaga sumberdaya genetik dan pemanfaatan produktivitas perairan umum, sehingga berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat.

Pada periode triwulan I, benih yang telah terdistribusi sebanyak 21.546.417 atau 24,80% ekor dari target 86.889.630 ekor. Realisasi bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat periode triwulan I tahun anggaran 2024 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Realisasi Bantuan Benih dan Restocking Triwulan I Tahun 2024

No	Satket DJPB	Benih yang Terdistribusi (Ekor)			Benih yang Terdistribusi (Ekor)
		Tawar	Payau	Laut	
1	Direktorat Perbenihan	63.620	-	-	63.620
2	BBPBAT Sukabumi	4.840.437	-	-	4.840.437

No	Satket DJPB	Benih yang Terdistribusi (Ekor)			Benih yang Terdistribusi (Ekor)
		Tawar	Payau	Laut	
3	BPBAT Sungai Gelam	1.145.000	-	-	1.145.000
4	BPBAT Mandiangin	1.317.000	-	-	1.317.000
5	BPBAT Tatelu	605.000	-	-	605.000
6	BPBAP Ujung Batee	-	4.484.960	65.000	4.549.960
7	BPBAP Takalar	-	3.462.000	15.000	3.477.000
8	BBPBL Lampung	-	-	32.000	32.000
9	BPBL Ambon	-	-	357.900	357.900
10	BPBL Batam	-	-	85.500	85.500
11	BPBL Lombok	-	-	73.000	73.000
12	BPIUUK Karangasem	-	5.000.000	-	5.000.000
Jumlah		7.971.057	12.946.960	628.400	21.546.417

Apabila dibandingkan antara triwulan 1 tahun 2024 dengan triwulan 1 pada tahun sebelumnya terjadi penurunan pendistribusian bantuan benih sekitar 9,39% kondisi ini dikarenakan pada saat triwulan pertama tahun 2024 kondisi curah hujan tinggi dan kesiapan lahan penerima bantuan belum optimal.

Pagu anggaran bantuan benih ikan sebesar Rp. 27.482.890.000,- Realisasi keuangan periode triwulan 1 tahun 2024 yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 2.704.795.710,-

Dalam pencapaian IKU, permasalahan yang dihadapi adalah pengajuan proposal tersendat. Rencana aksi atas hasil capaian triwulan 1 tahun 2024, yaitu memastikan proses pelaksanaan identifikasi dan verifikasi CPCL, serta lelang/ PL, serta distribusi benih berjalan sesuai spesifikasi dan jadwal. Rencana tindak lanjut tahun 2024, antara lain menghimbau agar pelaksanaan bantuan sesuai dengan pedoman Juknis Bantuan Benih Ikan, serta Satker DJPB yang melakukan penyaluran agar tetap konsisten terhadap target yang telah ditetapkan agar pencapaian penyaluran bantuan benih ikan dapat berjalan dengan lancar, serta melakukan monitoring serta pelaporan secara rutin terkait bantuan benih ikan air tawar, payau, dan laut.

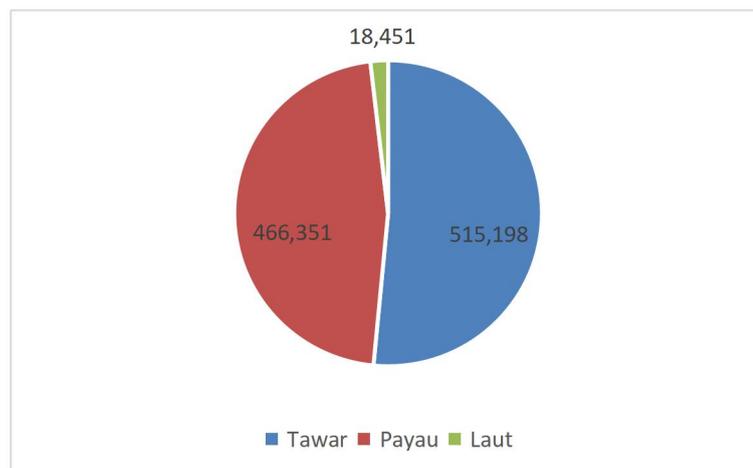
3.2.2.4. Calon Induk Unggul yang Diproduksi

Penyediaan induk unggul menjadi salah satu tugas pokok bagi unit pelaksana teknis di bawah DJPB. Melalui produksi ini, diharapkan akan memastikan ketersediaan benih bermutu. Pada tahun anggaran 2024, sebanyak 1.000.000 ekor calon induk menjadi target produksi bagi UPT lingkup DJPB dengan alokasi anggaran yang disediakan sebanyak Rp. 40.000.000.000,-. Sedangkan rincian target per UPT tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.7. Realisasi Bantuan Benih dan Restocking Triwulan I Tahun 2024

No	Unit Pelaksana Teknis	Target (ekor)
1	BBPBAT Sukabumi	167.638
2	BPBAT Sungai Gelam Jambi	119.901
3	BPBAT Mandiangin	113.690
4	BPBAT Tatelu	80.343
5	BBPBAP Jepara	97.421
6	BPBAP Ujung Batee	54.991
7	BPBAP Situbondo	80.981
8	BPBAP Takalar	79.979
9	BLUPPB Karawang	74.724
10	BPIUUK Karangasem	114.413
11	BBPBL Lampung	4.305
12	BPBL Ambon	4.090
13	BPBL Lombok	3.476
14	BPBL Batam	4.048
Jumlah Target		1.000.000

Komoditas yang diproduksi sebagai calon induk, terdiri atas beberapa spesies. Pada komoditas ikan air tawar seperti ikan mas, nila, lele, patin, gurami, serta ikan-ikan lokal lainnya. Komoditas ikan air payau, diantaranya adalah udang vanname, udang windu, bandeng, dan kepiting. Sedangkan untuk komoditas ikan laut antara lain kerapu, kakap putih, bawal bintang, bubara dan kobia. Berdasarkan jenis komoditasnya, target produksi calon induk dapat terlihat dalam diagram berikut.



Gambar 3.1. Target Produksi Calon Induk

Pada diagram diatas, target produksi calon induk ikan air tawar sebesar 515.198 ekor (51,5%), calon induk air payau 466.351 ekor (46,6%) dan calon induk laut 18.451 ekor (1,8%).

Kegiatan produksi calon induk di UPT lingkup DJPB pada periode triwulan I tahun 2024 belum dilakukan penghitungan karena karena target perhitungan secara semesteran, akan tetapi terdapat potensi produksi pada triwulan 1 yang dapat

dihitung sebanyak 103.263 ekor atau 10,33% dari target. Kondisi ini juga yang menyebabkan adanya perbeaan capaian triwulan 1 tahun 2024 dengan triwulan yang sama pada tahun berikutnya. Adapun rinciannya produksi calon induk ikan air tawar 68.483 ekor, calon induk ikan air payau 33.397 ekor, dan calon induk ikan laut 1.383 ekor.

Tabel 3.8. Capaian IKU Produksi calon induk di UPT

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Calon induk unggul yang diproduksi							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1					
93.342	1.039.745	1.000.000	-	0	-	-	-	1.000.000	-

Dalam rangka pencapaian target produksi calon induk pada periode berikutnya, direncanakan bahwa pada setiap UPT untuk tetap melakukan proses pemeliharaan dan secara rutin menyeleksi calon-calon induk.

Pagu anggaran untuk kegiatan pada IKU calon induk unggul yang diproduksi adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- dan sampai dengan triwulan I telah terealisasi sebesar Rp. 13.460.417.743,- atau 33,65%.

3.2.2.5. Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat

Indikator kinerja ini merupakan Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang disalurkan ke masyarakat. Rumput laut menjadi salah satu komoditas unggulan yang telah ditetapkan KKP. Produksi budidaya rumput laut tahun 2022 sebesar 9,23 juta ton yang berkontribusi sebanyak 62,07% dari total produksi perikanan budidaya pada tahun 2022. Sedangkan potensi lahan budidaya rumput laut di Indonesia adalah 175.967 ha. Jenis rumput laut yang dibudi dayakan yaitu *Eucheuma cottonii*.

Capaian Persentase bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke Masyarakat pada triwulan 1 belum dilakukan perhitungan, karena target perhitungan secara semesteran, namun dengan demikian ada potensi capaian yang dapat dihitung sebanyak 15.800 Kg berdsarkan usulan yang terverifikasi pada Triwulan 1 tahun 2024 sebagaimana Tabel 1. Sedangkan lokasi yang teridentifikasi

calon penerima bantuan terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Bali, dan sentra perikanan budidaya lainnya.

Tabel 3.9. Capaian Bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024			
-	-	26.300	0	0	-	-	-	1.000.000	-

Sedangkan untuk besarnya potensi terealisasinya anggaran di triwulan 1 untuk bantuan bibit rumput laut dari UPT-DJPB sebesar Rp. 599.722.107,- atau sebesar 75,35% dari pagu anggaran sebanyak Rp.795.967.000,-

Rencana aksi atas capaian triwulan 1 tahun 2024, agar pada triwulan berikutnya potensi penghtungan pada triwulan 1 dapat menjadi capaian pada triwulan 2 dengan memperhatikan keseuaian pada pedoman Juknis Bantuan Bibit rumput laut, Rekomendasi atas rencana aksi TW 1 tahun 2024 yakni agar UPT mempercepat proses verifikasi terhadap usulan proposal yang diajukan.

Rencana aksi selanjutnya yang akan dilakukan adalah (i) menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi penyusunan master plan, (ii) penyiapan dokumen kontrak secara paralel; dan (iii) koordinasi intens dengan UPT-DJPB yang melaksanakan bantuan bibit rumput laut.

Perbandingan pencapaian bantuan bibit rumput laut pada triwulan 1 dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan, kondisi ini karena pada tahun 2023 belum ada kegiatan penyaluran bantuan bibit rumput laut.

3.2.2.6. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat

Indikator kinerja ini merupakan Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat oleh 5 (lima) UPT, yaitu BBPBL Lampung, BPBL Lombok, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBAP Takalar. Rumput laut menjadi salah satu komoditas unggulan yang telah ditetapkan KKP. Produksi

budidaya rumput laut tahun 2022 sebesar 9,23 juta ton yang berkontribusi sebanyak 62,07% dari total produksi perikanan budidaya pada tahun 2022. Sedangkan potensi lahan budidaya rumput laut di Indonesia adalah 175.967 ha. Jenis rumput laut yang dibudidayakan yaitu cottonii dan sargasum.

Salah satu permasalahan dalam budidaya rumput laut ketersediaan bibit dan sarana pemeliharannya. Kualitas bibit rumput laut akan mempengaruhi hasil produksi akhirnya. Masyarakat pembudidaya rumput laut saat ini kesulitan dalam memperoleh bibit rumput laut, serta sarana pemeliharaan bibit yang standar. Oleh karena itu, DJPB menyediakan program bantuan kebun bibit rumput laut bagi para pembudidaya rumput laut untuk dapat membantu menyiapkan dan menyediakan bibit di sentra budidaya rumput laut di wilayahnya.

Penghitungan indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan antara jumlah kebun bibit rumput laut yang disalurkan kepada pembudidaya dengan jumlah usulan kebun bibit rumput yang telah diverifikasi. Penerima bantuan ini adalah kelompok pembudidaya rumput laut yang telah terdaftar di dinas dan memenuhi ketentuan dalam juknis bantuan.

Tabel. 3.10. Capaian Bantuan Kebun Bibit Rumput Luaut Triwulan 1 tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024			
-	-	83	-	0	0	0	-	-	-

Capaian bantuan kebun bibit rumput laut triwulan 1 tahun 2024 belum terealisasi namun ada potensi pencapaian sebanyak 9 unit atau tercapai 9% dari 100 unit usulan yang terverifikasi yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan potensi realisasi anggaran bantuan kebun bibit rumput laut pada triwulan 1 tahun 2024 sebesar Rp. 516.246.686,- atau sekitar 12,72%. dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.059.000.000,-

Rencana aksi triwulan 1 tahun 2024 yakni pelaksanaan bantuan sesuai dengan pedoman Juknis Bantuan Bibit rumput laut, serta UPT mempercepat proses verifikasi terhadap usulan proposal yang diajukan. Sedangkan tindak lanjut dari

rencana aksi pada triwulan 1 yang akan dilaksanakan pada triwulan ke 2 yaitu: (i) Menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi, (ii) Penetapan SK calon penerima bantuan, (iii) Penyiapan dokumen kontrak secara paralel; dan (iv) Koordinasi intens dengan UPT-DJPB yang melaksanakan bantuan KBRL.

Perbandingan pencapaian bantuan kebun bibit rumput laut pada triwulan 1 dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan, kondisi ini karena pada tahun 2023 belum ada kegiatan penyaluran bantuan kebun bibit rumput laut.

3.2.2.7. Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun

Indikator kinerja ini merupakan Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang dibangun. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode tahun 2021-2024 mencanangkan 5 Program Terobosan. Dalam implementasi program terobosan tersebut, Ditjen Perikanan Budi Daya fokus pada 2 program yaitu: 1) pengembangan perikanan budi daya berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan, antara lain: udang, lobster, kepiting, dan rumput laut; dan 2) pembangunan Kampung Perikanan Budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan.

Rumput laut merupakan salah satu komoditas potensial untuk dikembangkan mengingat permintaan pasar yang tinggi serta metode budi daya yang sederhana. Permintaan rumput laut yang besar dikarenakan perannya yang sangat penting dalam berbagai produk yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, baik melalui pengolahan sederhana yang langsung dapat dikonsumsi, maupun melalui pengolahan yang lebih kompleks, seperti produk farmasi, kosmetik, dan pangan, serta produk lainnya.

Pada tahun 2020, Indonesia adalah negara produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan volume 9,6 juta ton setelah China (20,8 juta ton) sementara urutan ketiga dan keempat adalah Korea Selatan (1,7 juta ton) dan Filipina (1,4 juta ton) (FAO, 2022). Produksi ini masih bisa ditingkatkan karena Indonesia memiliki potensi area budi daya laut yang cukup besar yaitu ±12 juta ha, serta iklim tropis yang mendukung untuk budi daya rumput laut. Dengan demikian tingkat

pemanfaatan lahan budi daya Rumput laut baru masih rendah. Untuk mewujudkan peningkatan produksi rumput laut diperlukan pendekatan untuk menyediakan budi daya berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat, yang bertujuan agar sistem logistik bibit rumput laut dapat lebih efektif dan efisien, terintegrasi dan komprehensif dapat memenuhi kebutuhan rumput laut pada suatu wilayah regional. Pengembangan kawasan budi daya rumput laut di tahun 2024 akan dilakukan di Provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur mengingat kedua Provinsi tersebut merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di Indonesia.

Berdasarkan Permen KP No. 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Rote Ndao telah ditetapkan sebagai salah satu Kampung Perikanan Budidaya Rumput Laut. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu produsen rumput laut terbesar di Provinsi Maluku setelah Kota Tual. Namun demikian dari potensi yang ada, pemanfaatannya baru 781,6 ha (sekitar 11%) di Kei Kecil dan 64,7 ha (sekitar 8%) di Kei Besar. Sementara itu, Kabupaten Rote Ndao yang terletak di Nusa Tenggara Timur memiliki potensi budi daya rumput laut seluas 32.000 Ha dan baru memanfaatkan sebanyak 2.124 ha. Pengukuran capaian atas indikator ini adalah dengan melihat progres pelaksanaan kegiatan di 2 lokasi modeling budidaya rumput laut berbasis kawasan ini.

Tabel 3.11. Capaian Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Persentase Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024			
-	-	2	-	0	0	0	-	-	-

Capaian pembangunan modeling budi daya rumput laut triwulan 1 tahun 2024 di 2 lokasi tercapai 0 % progres kegiatan yang terlaksana sebagaimana terlihat dari Tabel 5.3. Pembangunan modeling budi daya rumput laut berbasis kawasan akan dibangun di Kab. Rote Ndao, Prov. Nusa Tenggara Timur dan Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku.

Realisasi anggaran Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan di Direktorat Perbenihan pada triwulan 1 tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pagu anggaran sebesar Rp. 33.100.000.000,-
2. Realisasi anggaran hingga triwulan 1 2024 sebesar Rp. 193.250.500,- atau sebesar 0,58%. yang digunakan untuk identifikasi dan verifikasi calon lokasi, biaya penyusunan Feasibility Study.

Hasil evaluasi atas rencana aksi atas capaian triwulan 1 tahun 2024 yakni telah dilaksanakan penyusunan Feasibility Study di Kab. Rote Ndao dan Kab. Maluku Tenggara, telah dilaksanakan penyusunan dokumen kontrak yang akan dilanjutkan dengan kontrak pekerjaan selanjutnya, dan telah disusun petunjuk teknis pembangunan modeling budi daya rumput laut berbasis kawasan tahun 2024.

Rekomendasi atas rencana aksi triwulan 1 tahun 2024 yakni agar pelaksanaan pembangunan dapat dipercepat berdasarkan *time schedule* yang telah disusun, dan Agar dapat memperhatikan tiap progres berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Rencana aksi selanjutnya yang akan dilakukan adalah (i) penyusunan master plan, (ii) penyusunan DED, (iii) finalisasi dokumen-dokumen pengadaan untuk kebun *starter*, KBRL, BRL, Bouy penanda; dan (iv) koordinasi intens dengan Pemda setempat serta Eselon I lingkup KKP dan stakeholder.

3.2.2.8. Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi

Pusat produksi benih dan induk berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu Kab Mesuji (Prov. Lampung), Kab Musirawas (Prov. Sumatera Selatan), dan Kab Dharmasraya (Prov. Sumatera Barat).

Pada tahun 2024, BBPBAT Sukabumi mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dan operasional Pusat Produksi Benih dan Induk yang terletak di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

Sementara itu, BPBAT Sungai Gelam-Jambi mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2024 untuk pembangunan lahan *Broodstock Center* (BC) yang terletak di Desa Babat, Kecamatan STL Terawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi

Sumatera Selatan. Serta *Broodstock Center* (BC) di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.12. Capaian Progres operasional pusat produksi benih dan induk pada 3 lokasi

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk pada 3 Lokasi							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	55%	60%	-	0	0	0	-	-	-

Periode pengukuran pada IKU pusat produksi induk dan benih pada 3 lokasi adalah tahunan, sehingga pada triwulan I belum dilakukan perhitungan, namun progres operasional dan perencanaan pembangunan sudah berjalan, seperti berikut ini:

a) Kab Mesuji

Progres operasional pusat produksi benih dan induk di Kab Mesuji periode triwulan I, yaitu memiliki sarana produksi, namun belum melakukan pemeliharaan (Pembangunan tahun pertama dari rencana 5 tahun waktu pelaksanaan pembangunan). Hal-hal yang dilakukan pada triwulan I, antara lain: (i) Review DED dan gambar; (ii) Persiapan PL Perencanaan Konsultan; (iii) Persiapan pemasangan daya; dan (iv) Persiapan pembuatan sumur bor.

Pagu anggaran Pusat Produksi Benih dan Induk di Kab Mesuji tahun 2024 sebesar Rp.15.000.000.000.- dengan realisasi anggaran periode triwulan I sebesar Rp. 171.531.356,-

Permasalahan yang dihadapi di Pusat Produksi Benih dan Induk di Kab Mesuji, yaitu perlu adanya penyesuaian DED dengan kondisi di lapangan. Sehingga, rencana tindak lanjut tahun 2024 untuk pusat produksi benih dan induk di Kab Mesuji, yaitu review gambar dan DED, survei ke lapangan, koordinasi dengan konsultan perencana teknis.

b) Kab Dharmasraya

Progres operasional BC di Kab Dharmasraya periode triwulan I, yaitu: (i) Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva) namun

belum melakukan pemeliharaan induk/ benih; (ii) Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih; (iii) Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), dan sudah terdapat minimal 1 fasilitas pemeliharaan induk/ benih, namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih; (iv) Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), dan sudah terdapat minimal 1 fasilitas pemeliharaan induk/ benih, dan sudah melakukan pemeliharaan induk/ benih; dan (v) Memiliki sarana produksi berupa kolam induk, unit pemeliharaan larva, unit pendederan benih, fasilitas pemeliharaan induk/ benih dan sudah mampu memproduksi benih.

Hal-hal yang dilakukan pada triwulan I, antara lain: (a) Review DED dan gambar; (b) Kontrak PL perencanaan konsultan; dan (c) Persiapan PL belanja barang (pengadaan peralatan dan perlengkapan perikanan).

Pagu anggaran pembangunan BC di Kab Dharmasraya sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Pada triwulan I tahun 2023, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 34.288.200,-.

Permasalahan yang dihadapi di BC Kab Dharmasraya, yaitu perlu adanya penyesuaian gambar dengan kondisi lapangan dan anggaran. Sehingga, rencana tindak lanjut tahun 2024, yaitu review gambar, koordinasi dengan konsultan perencana.

c) Kab Musirawas

Progres operasional Broodstock Center di Kab Musirawas periode triwulan I, yaitu: (i) Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva) namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih; (ii) Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih; (iii) Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), dan sudah terdapat minimal 1 fasilitas pemeliharaan induk/ benih, namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih; (iv) Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), dan sudah terdapat minimal 1 fasilitas pemeliharaan induk/ benih, dan sudah melakukan pemeliharaan induk/

benih; (v) Memiliki sarana produksi berupa kolam induk, unit pemeliharaan larva, unit pendederan benih, fasilitas pemeliharaan induk/ benih dan sudah mampu memproduksi benih

Hal-hal yang dilakukan pada triwulan I, antara lain: (i) Review DED dan gambar; (ii) Kontrak PL perencanaan konsultan; dan (iii) Persiapan PL belanja barang (pengadaan peralatan dan perlengkapan perikanan).

Pagu anggaran pembangunan BC di Kab Musirawas sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Pada triwulan I tahun 2023, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 29.148.900,-

Permasalahan yang dihadapi di BC Kab Dharmasraya, yaitu perlu adanya penyesuaian gambar dengan kondisi lapangan dan anggaran. Sehingga, rencana tindak lanjut tahun 2024, yaitu review gambar, koordinasi dengan konsultan perencana.

3.2.3. Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha

3.2.3.1. Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disebut NSPK adalah petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga NSPK bidang perbenihan merupakan suatu petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan bidang perbenihan ikan.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan bidang perbenihan ikan. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan. Standar adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan bidang perbenihan ikan. Sedangkan kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan.

Sesuai dengan Rencana Strategis DJPB tahun 2020 – 2024 telah ditargetkan sebanyak 64 NSPK bidang perbenihan yang diterbitkan. Namun hingga tahun 2023, baru tercatat sebanyak 45 NSPK atau 70,31%. Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya keseluruhan NSPK sesuai Renstra antara lain

adanya kebijakan *automatic adjustment* yang menyebabkan beberapa forum terkait penyusunan NSPK bidang perbenihan tidak dapat dilaksanakan.

NSPK bidang perbenihan menjadi penting, karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan ikan. Beberapa penyusunan NSPK bidang perbenihan yang direncanakan pada tahun 2024 antara lain petunjuk teknis bantuan pemerintah lingkup kegiatan pengelolaan perbenihan ikan, penyusunan Rancangan SNI bidang perbenihan, dan hasil rumusan forum perbenihan ikan nasional.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah rekomendasi kebijakan berupa penerbitan NSPK atau kebijakan-kebijakan lain terkait bidang perbenihan ikan pada tahun 2024 dibandingkan terhadap target rekomendasi kebijakan bidang perbenihan tahun 2020 – 2024.

Tabel 3.13. Capaian NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Akses Pemodalan dan Jaminan Usaha							
IKU		Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	-	70	-	0	0	0	-	-	-

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan, sehingga belum dapat dilakukan analisa terhadap capaiannya. Adapun NSPK bidang perbenihan yang disusun antara lain rumusan Kegiatan Forum Jejaring Perbenihan Nasional, Penilaian Jenis Ikan Baru yang akan dibudidayakan, dan RSNI Perikanan Budidaya Bidang Perbenihan.

Terkait progres kegiatan pada triwulan I ini, rumusan kegiatan forum jejaring perbenihan nasional masih dalam proses persiapan kegiatan, proses perbaikan draft naskah akademik pada kegiatan penilaian jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, dan pembahasan rancangan pada kegiatan RSNI perikanan budidaya bidang perbenihan.

3.2.4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan

3.2.4.1. Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB

Pada tahun 2024, DJPB menargetkan sebanyak 150 unit pembenihan mendapatkan pembinaan dalam rangka persiapan menuju sertifikasi CPIB, dengan target pada IKU adalah 50% unit pembenihan yang mendapatkan pembinaan dapat tersertifikasi. Sampai dengan periode triwulan I (Januari – Maret 2024) telah dilakukan pembinaan terhadap 29 unit pembenihan, dengan rincian sebanyak 23 unit pembenihan ikan berlokasi di provinsi Jawa Tengah dan 6 unit pembenihan ikan berlokasi di provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 3.14. Capaian Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan CPIB Dibandingkan dengan yang Mendapatkan Sertifikat CPIB

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Akses Pemodalan dan Jaminan Usaha							
IKU		Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1					
-	-	50%	-	0	0	0	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi IKU Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB belum terealisasi. Hal ini disebabkan karena adanya peralihan wewenang lembaga yang dapat melakukan penilaian kesesuaian untuk sertifikasi. Mengacu pada Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menjadi tugas dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP).

Anggaran yang tersedia pada kegiatan pembinaan unit pembenihan ikan adalah sebesar Rp. 800.000.000,- dan hingga triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 64.282.300,- atau 8,04%.

Perbandingan pencapaian pada iku ini pada triwulan 1 dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan, kondisi ini karena pada tahun 2023 belum ada iku tentang unit pembenihan yang mendapat pembinaan cpib.

3.2.5. Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan

3.2.5.1. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan

Indikator kinerja ini adalah adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar profesional ASN terdiri dari :

- a. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS. Bobot dimensi ini sebesar 25%, dengan besaran sub-bobot : (i) S-3 sebesar 25%; (ii) S-2 sebesar 20%; (iii) S-1/D-IV sebesar 15%; (iv) D-III sebesar 10%; (v) SLTA/D-I/D- II/ sederajat sebesar 5%; dan dibawah SLTA sebesar 1%.
- b. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/ Workshop/ Magang/ Sejenis).

Tabel 3.15. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan TW 1 tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
IKU		Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Direktorat Perbenihan							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Target 2024		% Capaian thd target akhir Renstra	
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	84,91	85	-	-	-	-	-	85	-

Capaian triwulan 1 tahun 2024 belum dapat dihitung karena indikator kinerja ini merupakan indikator bersifat semesteran, sehingga pencapaiannya belum dapat diukur. Namun, berdasarkan rencana aksi untuk triwulan berikutnya, diharapkan Direktorat Perbenihan menghimbau kepada seluruh PNS agar meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti seminar, pelatihan secara online maupun offline.

3.2.5.2. Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan

Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan merupakan indikator kinerja yang targetnya bersifat tahunan dan pencapaiannya dihitung di akhir tahun berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal KKP terhadap pemenuhan dokumen dan capaian kinerja Direktorat Perbenihan.

Tabel 3.16. Capaian Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan TW 1 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
IKU		Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di Direktorat Perbenihan							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi	Target	Realisasi			Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1					
-	64,05	82	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini pengukurannya bersifat tahunan, maka hasil penilaian belum dapat disajikan. Namun rencana aksi untuk trwulan berikutnya adalah memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk dapat memenuhi nilei rekon SAKIP lingkup Dit. Perbenihan.

3.2.5.3. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perbenihan

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang dokumen tindak lanjutnya dari Direktorat Perbenihan telah tuntas berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Perbenihan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat) yang terbit pada

Tahun yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat perbenihan yang menjadi objek pengawasan

Tabel 3.17. Capaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan TW 1 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
IKU		Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di Direktorat Perbenihan							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
100	100	80	80	90	113	113	-	85	105,88

Pada triwulan 1 tahun 2023 capaian hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Perikanan Budi Daya terhadap pelaksanaan kegiatan Direktorat Perbenihan sebesar 90%. Apabila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2023, pencapaian target Direktorat Perbenihan menunjukkan hasil yang sedikit lebih rendah yaitu pencapaian pada triwulan 1 tahun 2024 bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2023 adalah sebesar 90%. Rekomendasi atas rencana aksi triwulan 1 tahun 2024, Direktorat Perbenihan agar meningkatkan penyelesaian hasil pengawasan dengan mengupayakan semua kegiatan dalam administrasi kegiatan agar bisa dilengkapi dan tepat waktu serta akuntabel.

3.2.5.4. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Perbenihan

Indikator Kinerja (IK) pada sasaran strategis ini adalah persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 2 yang mendistribusikan informasinya melalui *platform Portal Collaboration Office*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IK dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data

Tabel 3.18. Capaian Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
IKU		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024			
100	125,9	94	94	133,33	141,84	141,84	-	-	-

Pada triwulan 1 tahun 2024 target manajemen pengetahuan yang terstandar pada Direktorat Perbenihan ditargetkan sebesar 94 dengan realisasi 133,33 (141,84%). Apabila dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya capaian menunjukkan ada kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai yang salah satu penyebabnya adalah manajemen pengetahuan terstandar pada triwulan 1 tahun 2024 hanya diwajibkan bagi Eselon 2.

Rencana aksi atas hasil capaian di triwulan 1 tahun 2024, agar eselon 2 selalu mempersiapkan laporan yang dianggap perlu untuk dipublikasikan secara benar dengan memperhatikan kaidah transparan, efisien selalu tepat waktu dan tepat sasaran.

3.2.5.5. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Perbenihan

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Pada Tahun

2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan di satker direktorat perbenihan pada tahun 2024 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan;
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Tabel 3.19. Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
IKU		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1					
-	93,46	80	-	-	-	-	-	-	-

Pada triwulan 1 tahun 2024, capaian belum tersedia karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Namun demikian, untuk mempertahankan nilai efektivitas yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya, Direktorat Perbenihan berupaya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi tolok ukur dalam penilaiannya.

3.2.5.6. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA

Indikator Kinerja ini merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar didatabase KUSUKA dengan status submit, valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengupulkan/updating data pelaku usaha yang terlibat di kegiatan perbenihan. Target total pelaku usaha yang terdaftar di KUSUKA pada tahun 2024 sebanyak 4.833 orang.

Tabel 3.20. Capaian Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
IKU		Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024			
10.41	80	91	10	32,96	329,60	36,22	-	-	-

Capaian indikator kegiatan persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA pada triwulan 1 tahun 2024 seperti tertera dalam tabel 3.20., realisasi mencapai 32,96 atau sekitar 329,60 persen dari target 10. Kondisi ini menunjukkan bahwa persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang erintegrasi KUSUKA cukup besar dan sudah dikategorikan baik karena telah melebihi dari target, namun dalam pelaksanaan selanjutnya masih dapat dioptimalkan Kembali.

Rencana tindak lanjut di triwulan berikutnya agar pelaku usaha yang terlibat di kegiatan perbenihan didorong untuk mendaftar di aplikasi KUSUKA sehingga tercantum di database.

3.2.5.7. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan

Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dalam kegiatan ini akan dilakukan audit kearsipan yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan sendiri adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 3.21. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
IKU		Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024			
-	-	75	-	-	-	-	-	-	-

Capaian indikator kegiatan nilai pengawasan kearsipan unit kearsipan Direktorat Perbenihan pada triwulan 1 tahun 2023 belum dapat diukur karena indikator ini bersipat tahunan serta tidak ada dalam rentra DJPB 2020- 2024 sehingga belum dapat dijadikan pembandingan atas keberhasilan pada tahun sebelumnya. Namun demikian, agar target kegiatan ini tercapai di akhir tahun, Direktorat Perbenihan berupaya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi tolok ukur dalam penilaiannya.

3.2.5.8. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan

Persentase layanan perkantoran direktorat perbenihan adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena indikator kinerja ini merupakan ukuran atas pelaksanaan layanan perkantoran yang meliputi pelayanan jasa dan administrasi yang dilaksanakan di Direktorat Perbenihan.

Tabel 3.22. Capaian Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
IKU		Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024			
100	75	80	80	100	125	125	-	-	-

Capaian indikator kegiatan persentase pelaksanaan layanan perkantoran triwulan 1 tahun 2024 seperti tertera dalam tabel 3.22., realisasi mencapai 100 atau sekitar 125 persen dari target 80 yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator ini merupakan hasil kerja Direktorat Perbenihan terutama terkait pelayanan

perkantoran seperti pelayanan persuratan berdasarkan data yang masuk untuk permintaan nomor sebanyak 278 surat dengan semua permintaan nomor surat terlayani dan layanan rapat yang dilakukan secara offline dari total permintaan 16 kali semuanya telah tuntas dilakukan.

Rencana aksi atas capaian triwulan berikutnya adalah untuk meningkatkan pelayanan lebih baik agar tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3.2.5.9. IKSK.04.9 Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan

Persentase realisasi keuangan direktorat perbenihan adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas realisasi penyerapan anggaran berdasarkan terhadap pagu anggaran Direktorat Perbenihan.

Tabel 3.23. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
IKU		Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2023-2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 1	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 1	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024			
2,79	99,98	98	5	2,37	47,40	2,42	-	-	-

Capaian indikator kegiatan Persentase Realisasi Kuangan Direktorat Perbenihan tahun 2024, seperti terlihat dalam tabel dimana realisasi mencapai 47,40 persen dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target triwulan 1 yaitu realisasi sebesar 5% disebabkan oleh sejumlah kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sehingga anggaran belum dapat diserpa untuk direalisasikan.

Rencana aksi atas hasil capaian triwulan 1 pada tahun 2024, Direktorat Perbenihan akan mempercepat pelaksanaan realisasi kegiatan sehingga target pada TW 2 dapat tercapai.

BAB 4. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perbenihan triwulan 1 tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala terhadap capaian strategis Direktorat Perbenihan.
2. Terhadap capaian kinerja, selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi, serta perbandingan terhadap capaian triwulan 1 tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
3. Secara umum, Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Direktorat Perbenihan yang diperjanjikan pada triwulan 1 tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sangat baik dengan nilai 111,99 namun ada indikator kinerja keuangan yang dibawah target.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja triwulan 1 Direktorat Perbenihan tahun 2024 sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Perlu mempertahankan target - target indikator kinerja Utama (IKU) yang sudah tercapai dengan melakukan monitoring dan pendokumentasian yang baik sehingga konsistensi pencapaian target kinerja dapat dipertahankan.
2. Direktorat Perbenihan akan memantau dan berkoordinasi dengan bagian Program DJPB kemungkinan penyesuaian target apabila terjadi perubahan anggaran, hal ini untuk menghindari terjadi revisi perjanjian kinerja.
3. Melakukan percepatan pembinaan terhadap unit pembenihan yang sudah mengusulkan untuk dilakukan sertifikasi CPIB.
4. Melakukan rekapitulasi hasil pembinaan unit pembenihan yang siap sertifikasi untuk ditindak lanjuti penilaian sertifikasi CPIB.
5. Direktorat Perbenihan akan memperbaiki dalam perencanaan kedepan agar dapat mengajukan pembayaran dari kegiatan bantuan masyarakat dilakukan secara Lumpsum (LS) dan diusahakan pengajuan jangan sampai diakhir bulan triwulan berikutnya.